

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB III, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pengembangan pariwisata di Wisata Kawasan Kaliadem bertujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kawasan Kaliadem pasca erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Dalam hal ini, pemanfaatan kawasan Kaliadem dinilai sebagai langkah untuk mengatasi persoalan tersebut sehingga kondisi perekonomian masyarakat diharapkan dapat kembali pulih seperti semula. Sejalan dengan itu, pemerintah desa merupakan pihak yang pertama kali menginisiasi pembenahan kawasan Kaliadem dengan mengajak masyarakat setempat untuk turut serta di dalam prosesnya. Dalam hal ini, masyarakat diberikan kewenangan untuk mengeksplorasi potensi kawasan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam proses pengembangan pariwisata ini, masyarakat memiliki kedudukan dalam menyusun, menentukan, hingga mengevaluasi keputusan yang telah dibuatnya.

Sejak awal, pelaksanaan manajemen komunitas telah ditunjukkan melalui peran sinergi antara pemerintah desa dan komunitas di dalam proses pembenahan kawasan Kaliadem. Manajemen komunitas digunakan sebagai langkah untuk mentransfer wewenang dan kendali pemerintah kepada masyarakat secara penuh. Pada prosesnya, pemerintah desa memiliki kedudukan dalam menyusun rencana perbaikan kawasan Kaliadem, sedangkan masyarakat turut menjadi pekerja atas kegiatan perbaikan pasca erupsi merapi tersebut. Sejalan dengan proses tersebut, komunitas berupaya untuk mendorong pemerintah desa supaya lebih memanfaatkan sumber daya yang ada di kawasan Kaliadem agar dapat dimanfaatkan secara bersama, sehingga upaya perbaikan ini tidak hanya berhenti di situ saja. Upaya ini dinilai sebagai latar belakang mengapa masyarakat menjadi pengelola dan bertanggung jawab atas kegiatan pengembangan Wisata Kawasan Kaliadem. Dalam hal ini, komunitas akan dapat mengelola kawasan tersebut secara berkesinambungan melalui kemampuan dan kapabilitas yang dimilikinya secara mandiri. Melalui kondisi tersebut, kedudukan yang dimiliki komunitas menjadi semakin kompleks. Komunitas kemudian menjadi pihak yang selalu terlibat di dalam forum pertemuan dan memiliki hak otoritas yang sah untuk membuat

keputusan terhadap pengelolaan kawasan. Tidak hanya menjadi penentu keputusan, komunitas juga memiliki kedudukan di dalam hal pelaksanaan keputusan yang pada dasarnya dilaksanakan oleh mereka sendiri. Keputusan yang telah dibuat oleh komunitas selalu bersifat mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat, oleh karena itu komunitas selalu melakukan pemantauan terhadap keputusan yang sedang dijalankan di lapangan.

Dalam upaya pengembangan Wisata Kawasan Kaliadem ini, komunitas dihadapkan pada hambatan-hambatan seperti kondisi keuangan komunitas yang belum stabil dan akses perizinan pembukaan Wisata Kawasan Kaliadem yang tidak mendapat rekomendasi dari pemerintah kabupaten. Kedua hambatan ini terjadi pada awal proses pengembangan. Hambatan lain yaitu mengacu pada kondisi internal komunitas, yaitu ketidakefektifan forum pertemuan yang disebabkan banyaknya adu argumentasi dan minimnya kehadiran anggota komunitas pada pertemuan rapat. Hal ini dinilai akan mempengaruhi proses pembuatan dan penentuan keputusan. Selain itu, komunitas juga mengalami hambatan dalam hal penjualan dan pembelian tiket yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, serta minimnya pembangunan oleh pemerintah kabupaten, meskipun komunitas telah membayarkan pajak aktivitas wisatanya secara rutin.

Seluruh hambatan yang telah disebutkan di atas kemudian dicoba untuk diatasi oleh komunitas. Masalah keterbatasan dana diatasi komunitas dengan mengajak pengusaha tambang dan *jeep* wisata untuk bekerja sama dalam memenuhi akses pendanaan melalui pemberlakuan sistem retribusi bagi angkutan yang melintas di kawasan Kaliadem. Dalam hal akses perizinan, komunitas mendorong internalnya dan pemerintah desa untuk tetap melaksanakan kegiatan pembukaan Wisata Kawasan Kaliadem dengan menjamin keselamatan wisatawan yang nantinya akan berwisata di sana. Hambatan yang dialami oleh internal komunitas juga diatasi dengan membatasi pendapat para anggota komunitas dan mengatur ulang jadwal pertemuan apabila masih ditemukan minim kehadiran. Selain itu, hambatan dalam pemberlakuan harga tiket retribusi juga diatasi komunitas dengan melakukan audit guna mengetahui besaran kerugian dan lama praktik berlangsung. Minimnya pembangunan oleh pemerintah kabupaten juga diatasi oleh komunitas

dengan menyusun proposal pembangunan yang kemudian diteruskan oleh pemerintah desa.



**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Fahmi, I. (2012). *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, S.P, Malayu. (2009). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Korten, David C. (1986). *Community Management: Asian Experience and Perspective*. Connecticut: Kumarian Press.
- Milles, B. Matthew & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy.J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pitana, I Gde & Diarta, I Ketut Surya. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. ANDI Yogyakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi. (1993). *Manajemen Pengejaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cita.
- Sulastrri, L. (2012). *Manajemen Sebuah Pengantar*. Bandung: La Goods Publishing.
- Terry, G.R & Rue, Leslie. W. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wowor, A.J. (2011). *Pariwisata Bagi Masyarakat Lokal*. Salatiga: Program Pasca Sarjana, Studi Pembangunan, Universitas Satya Wacana.

Yoeti, Oka, A. (2008). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta, Pradaya Pratama.

**Non Buku:**

**Jurnal:**

Andreastuti, S. Dwi. “Menelusuri Kebenaran Letusan Gunung Merapi 1006”. *Jurnal Geologi Indonesia, Vol. 1 No. 4 Desember 2006: 201-207*

Budiyah, F. (2020). “Implikasi Pengembangan Desa Wisata Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal Studi Kasus Di Desa Ketenger”. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Volume 22 No 2 Tahun 2020 (182-190)*.

Evans, P. (1992). “Community Management of Improved Water Supply Systems”. *International Water and Sanitation Centre. Juli 1992*.

Huda, R. (2020). “Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pariwisata di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga”. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial Volume 11, No. 2 Desember 2020*.

Manafe, A.H., Tanaamah, A.R. (2004). “Masyarakat Lokal Dan Keberadaan Wisatawan Di Nemberala”. *KRITIS, Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin Vol. XVI No. 3, 2004*.

Ratnaningsih, N.L.G., Mahagangga, I.G.A.O (2015). “Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pariwisata (Studi Kasus Di Desa Wisata Belimbing, Tabanan, Bali)”. *Jurnal Destinasi Pariwisata Vol. 3 No 1, 2015 (15-51)*.

McCommon, C., Warner, D., Yohalem, D. (1990), “Community Management Of Rural Water Supply And Sanitation Services”. *The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 1990*.

Nurhidayati, S.E., & Fandeli, C. (2012). "Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kota Batu, Jawa Timur". *Jejaring Administrasi Publik. Th IV. Nomor 1, Januari-Juni 2012*.

P. A. Suswandi. (2013). "Pola Kemitraan Pariwisata dalam Manajemen Atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda". *Jurnal Nasional Pariwisata Volume 5, Nomor 3, Desember 2013 (189 - 200)*.

Pitana, I Gde. (1999). "A Community Management dalam Pembangunan Pariwisata". *Majalah Ilmiah Pariwisata – Analisis Pariwisata Program Studi Pariwisata Universitas Udayana Volume 2 Nomor 2 Tahun 1999*.

Putri, J.H.P., & Manaf, A. (2013). "Faktor-Faktor Keberhasilan Pengembangan Desa Wisata di Dataran Tinggi Dieng". *Jurnal Teknik PWK. Volume 2 Nomor 3*.

Pratiwi, B.D., Pinasti, V.I.S (2017). "Pariwisata dan Budaya (Studi Peran Serta Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Pariwisata di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul)". *Jurnal Pendidikan Sosiologi 2017*.

Santosa, I Nengah & Mahagangga, I.G.A.O (2013). "Pengembangan Destinasi Berkualitas Di Bali". *Jurnal Destinasi Pariwisata. Volume 1 Nomor 1, Juli-Desember 2003*.

Satrio, D., & Sabana, C. (2018). "Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Jurnal PENA Vol.32 No.1 Edisi Maret 2018*.

Senyk, J. (2005). "Lessons From The Equator Initiative: Community Based Management by Pred Nai Community Forestry Group in The Mangroves of Southeastern Thailand". *Winnipeg: Natural Resources Institute . University of Manitoba*.

Shantika, B., & Mahagangga, I.G.A.O (2018). “Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Pulau Nusa Lembongan”. *Jurnal Destinasi Pariwisata Vol. 6 No 1, 2018 (177-183)*.

Timothy. (1999). “Participatory Planning : a view of Tourism in Indonesia”. *Annals of Tourism Research, Vol.26*.

**Website:**

Andrea L, 2020. “*Jumlah Wisatawan Global 2019 Hanya Tumbuh 3,8%*” diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/24/jumlah-wisatawan-global-2019-hanya-tumbuh-38> pada tanggal 17 September 2021.

Kememparekraf, 2020. “*Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2019*” diakses dari <https://kememparekraf.go.id/laporan-kegiatan/Laporan-Akuntabilitas-Kinerja-Kememparekraf-Baparekraf> pada tanggal 12 April 2021.

Badan Geologi Kementerian ESDM, 2014. “*G.Merapi*” diakses dari <https://vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/data-dasar-gunungapi/542-g-merapi?start=1> pada tanggal 30 November 2021.

Rizlia K. Nisa, 2018. “*Kekuatan Pariwisata Indonesia Masuk 10 Besar Dunia Versi WTTC*” diakses dari <https://www.merdeka.com/gaya/kekuatan-pariwisata-indonesia-masuk-10-besar-dunia-versi-wttc.html#:~:text=Oleh%20The%20World%20Travel%20%26%20Tourism,Anggotanya%20tersebar%20ke%20banyak%20negara> pada tanggal 12 April 2021.

Sutiarso, M.A. Artikel. 2018. *Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Ekowisata* diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/327538432\\_PENGEMBANGAN\\_PARIWISATA\\_YANG\\_BERKELANJUTAN\\_MELALUI\\_EKOWISATA](https://www.researchgate.net/publication/327538432_PENGEMBANGAN_PARIWISATA_YANG_BERKELANJUTAN_MELALUI_EKOWISATA) pada tanggal 12 Mei 2021.

Zena Rera A, 2020. “*Sejarah Letusan Merapi, Perbedaan Erupsi pada 2006 dan 2010*” diakses dari <https://tirto.id/sejarah-letusan-merapi-perbedaan-erupsi-pada-2006-dan-2010-f6ED> pada tanggal 30 November 2021.





**LAMPIRAN**

## DAFTAR PERTANYAAN

### Profil Informan:

1. Siapa nama Bapak?
2. Berapa usia Bapak?
3. Apa pekerjaan utama Bapak?
4. Apa jabatan/posisi Bapak dalam organisasi yang mengelola tempat wisata ini?
5. Sudah berapa lama menjabat?
6. Sudah berapa lama membantu mengelola tempat wisata ini?
7. Apa alasan Bapak terlibat dalam membantu mengelola tempat wisata ini?
8. Sudah berapa lama Wisata Kawasan Kaliadem terbentuk?
9. Bagaimana awal mula pembentukan Wisata Kawasan Kaliadem?
10. Siapa saja yang terlibat dalam pembentukan Wisata Kawasan Kaliadem?  
Dalam hal apa saja keterlibatan mereka?

Rumusan Masalah	Konsep/Teori	Indikator	Daftar Pertanyaan
<b>Bagaimana pelaksanaan manajemen komunitas dalam pengembangan Wisata Kawasan Kaliadem?</b>	<b>Manajemen Komunitas:</b> Kemampuan masyarakat atau komunitas untuk memiliki tanggung jawab, otoritas, dan pengendalian terhadap arah pembangunan yang akan mempengaruhi kehidupannya sendiri	Tanggung jawab, otoritas, pengendalian	
	<b>Tanggung jawab:</b> Komunitas mengambil alih kepemilikan dan kewajiban untuk sistem	Mampu mengambil alih kepemilikan, kewajiban untuk sistem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana status kepemilikan obyek wisata yang ada di Wisata Kawasan Kaliadem? Siapa saja pemiliknya?</li> <li>2. Bila pemilik sebelumnya bukan masyarakat lokal, bagaimana prosesnya sampai akhirnya masyarakat mampu mengambil alih kepemilikan obyek Wisata Kawasan Kaliadem?</li> <li>3. Apa saja kewajiban pemilik dalam mengembangkan obyek Wisata Kawasan Kaliadem?</li> <li>4. Apa saja bentuk tanggung jawab komunitas dalam</li> </ol>

			<p>mengembangkan obyek wisata di Wisata Kawasan Kaliadem?</p> <p>5. Bagaimana pembagian kewajiban dan tanggung jawab komunitas dalam mengembangkan obyek wisata di Wisata Kawasan Kaliadem?</p>
<p><b>Otoritas:</b> Komunitas memiliki hak yang sah untuk membuat keputusan mengenai sistem</p>	<p>Hak yang sah, membuat keputusan</p>		<p>6. Bagaimana proses pembuatan keputusan di Wisata Kawasan Kaliadem?</p> <p>7. Siapa saja anggota komunitas yang berhak terlibat dalam proses pembuatan keputusan tersebut? Apa saja peran mereka?</p> <p>8. Bagaimana cara menentukan anggota komunitas yang berhak terlibat dalam membuat keputusan terkait pengembangan obyek Wisata Kawasan Kaliadem?</p> <p>9. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan sebagai alat untuk menjangkau aspirasi dan gagasan dari anggota komunitas yang tidak terlibat langsung dalam membuat keputusan? Apabila ada, bagaimana prosesnya?</p>
<p><b>Pengendalian:</b> Masyarakat mampu melaksanakan dan menentukan hasil keputusannya</p>	<p>Mampu melaksanakan, menentukan hasil keputusan.</p>		<p>10. Bagaimana pelaksanaan keputusan terkait pengembangan obyek Wisata Kawasan Kaliadem? Apakah keputusan ini mengikat semua anggota komunitas?</p> <p>11. Bagaimana cara komunitas menentukan bahwa pelaksanaan pengembangan obyek Wisata Kawasan Kaliadem sudah sesuai dengan keputusan yang dibuat?</p> <p>12. Bila hasil pelaksanaan keputusan tidak sesuai dengan keputusan bersama, apa yang dilakukan oleh komunitas?</p>
<p><b>Usaha yang perlu dilakukan dalam hal pengembangan pariwisata:</b></p>			

	1) Promosi untuk memperkenalkan obyek dan kawasan wisata	Promosi	<p>13. Promosi seperti apa yang telah dilakukan untuk Wisata Kawasan Kaliadem?</p> <p>14. Promosi dilakukan dengan cara atau media apa saja? Apa alasan memilih cara-cara ini?</p> <p>15. Siapa yang bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan promosi tersebut? Apa alasan menunjuk mereka sebagai penanggung jawab?</p>
	2) Transportasi yang lancar	Kelancaran transportasi	<p>16. Bagaimana dengan aksesibilitas transportasi menuju Wisata Kawasan Kaliadem?</p> <p>17. Siapa yang bertanggung jawab dalam mengelola sarana dan prasarana transportasi di wilayah Wisata Kawasan Kaliadem?</p>
	3) Kemudahan keimigrasian atau birokrasi	Kemudahan imigrasi dan birokrasi	<p>18. Apakah ada kemudahan birokrasi dalam mengurus wisatawan mancanegara? Bila ada, kemudahannya dalam hal apa saja? Apa alasan memberikan kemudahan ini?</p> <p>19. Bagaimana pemberlakuan retribusi bagi wisatawan luar negeri? Apakah ada perbedaan harga tiket masuk dan fasilitas lainnya untuk wisatawan mancanera dengan wisatawan nusantara? Bila ada, apa alasannya?</p>
	4) Akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman	Akomodasi nyaman	<p>20. Bagaimana perencanaan dan pengembangan akomodasi yang nyaman bagi wisatawan di Wisata Kawasan Kaliadem?</p> <p>21. Apa saja kriteria yang ditentukan oleh pihak manajemen komunitas dalam merancang dan mengembangkan akomodasi yang nyaman? Siapa pihak yang diberikan tanggung jawab dalam mengurus akomodasi tersebut?</p> <p>22. Akomodasi apa saja yang ditawarkan kepada wisatawan?</p>

	5) Pemandu wisata yang cakap	Pemandu wisata cakap	<p>23. Bagaimana cara pihak manajemen komunitas dalam menentukan pemandu wisata?</p> <p>24. Apakah pemandu wisata harus berasal dari anggota komunitas atau tidak? Apa saja kriteria untuk bisa menjadi pemandu wisata?</p> <p>25. Apakah tarif pemandu wisata ditentukan oleh pihak manajemen komunitas? Bila iya, apa alasannya? Bila tidak, apa alasannya?</p>
	6) Penawaran barang barang dan jasa dengan mutu terjamin dan tarif harga yang wajar	Barang dan jasa bermutu dengan harga wajar	26. Bagaimana cara pihak manajemen komunitas mengawasi harga barang dan jasa yang ditawarkan kepada wisatawan? Siapa pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi mutu dan harga barang tersebut?
	7) Pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang menarik	Atraksi menarik	<p>27. Atraksi wisata apa saja yang dirancang dan diimplementasikan di Wisata Kawasan Kaliadem? Bagaimana prosesnya?</p> <p>28. Siapa yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan atraksi tersebut? Apa alasan menunjuk mereka sebagai penanggung jawab?</p>
	8) Kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup	Lingkungan hidup bersih dan sehat	<p>29. Bagaimana pihak manajemen komunitas menjamin keberadaan lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi wisatawan?</p> <p>30. Apa saja yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat? Siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab di dalamnya? Apakah anggota komunitas dilibatkan?</p>
<b>Apa saja hambatan-hambatan yang dialami selama pelaksanaan manajemen komunitas dalam</b>	<b>Manajemen Komunitas:</b> Kemampuan masyarakat atau komunitas untuk memiliki tanggung jawab, otoritas, dan pengendalian		

<p><b>pengembangan Wisata Kawasan Kaliadem?</b></p>	<p>terhadap arah pembangunan yang akan mempengaruhi kehidupannya sendiri</p>		
	<p><b>Tanggung jawab:</b> Komunitas mengambil alih kepemilikan dan kewajiban untuk sistem</p>	<p>Mampu mengambil alih kepemilikan, kewajiban untuk sistem</p>	<p>31. Apa saja hambatan yang dialami oleh komunitas dalam proses pengambilalihan kepemilikan obyek Wisata Kawasan Kaliadem? 32. Apa saja hambatan yang dialami pemilik dalam mengembangkan obyek wisata sesuai dengan tanggung jawabnya? 33. Apa saja hambatan yang dialami dalam pembagian kewajiban dan tanggung jawab komunitas guna mengembangkan obyek Wisata Kawasan Kaliadem?</p>
	<p><b>Otoritas:</b> Komunitas memiliki hak yang sah untuk membuat keputusan mengenai sistem</p>	<p>Hak yang sah, membuat keputusan</p>	<p>34. Apa saja hambatan yang dialami komunitas dalam proses pembuatan keputusan yang ada di Wisata Kawasan Kaliadem? 35. Apa saja hambatan yang dialami dalam menjangkau aspirasi dan gagasan dari semua anggota komunitas dalam proses pembuatan keputusan?</p>
	<p><b>Pengendalian:</b> Masyarakat mampu melaksanakan dan menentukan hasil keputusannya</p>	<p>Mampu melaksanakan, menentukan hasil keputusan</p>	<p>36. Apa saja hambatan yang dialami dalam melaksanakan keputusan terkait pengembangan obyek Wisata Kawasan Kaliadem? 37. Apa saja hambatan yang dialami komunitas apabila hasil pelaksanaan keputusan tidak sesuai dengan keputusan bersama?</p>
	<p><b>Usaha yang perlu dilakukan dalam hal pengembangan pariwisata:</b></p>		
	<p>1) Promosi untuk memperkenalkan obyek dan kawasan wisata</p>	<p>Promosi</p>	<p>38. Apa saja hambatan yang dialami dalam merancang promosi Wisata Kawasan Kaliadem? 39. Apa saja hambatan yang dialami dalam</p>

			mempromosikan Wisata Kawasan Kaliadem?
	2) Transportasi yang lancar	Kelancaran transportasi	40. Apa saja hambatan yang dialami dalam menyiapkan akses transportasi menuju Wisata Kawasan Kaliadem?
	3) Kemudahan keimigrasian atau birokrasi	Kemudahan imigrasi dan birokrasi	41. Apa saja hambatan yang dialami oleh pihak manajemen komunitas dalam memberikan kemudahan bagi wisatawan? 42. Apa saja hambatan yang dialami oleh pihak manajemen komunitas dalam menentukan retribusi bagi wisatawan dalam dan luar negeri?
	4) Akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman	Akomodasi nyaman	43. Apa saja hambatan yang dialami dalam membuat perencanaan dan pengembangan akomodasi yang nyaman bagi wisatawan? 44. Apa saja hambatan yang dialami oleh pihak manajemen komunitas dalam menentukan kriteria akomodasi yang nyaman bagi wisatawan?
	5) Pemandu wisata yang cakap	Pemandu wisata cakap	40. Apa saja hambatan yang dialami dalam menentukan kriteria pemandu wisata beserta dengan tarifnya? 41. Apa saja hambatan yang dialami dalam memperoleh pemandu wisata yang cakap dari komunitas?
	6) Penawaran barang barang dan jasa dengan mutu terjamin dan tarif harga yang wajar	Barang dan jasa bermutu dengan harga wajar	41. Apa saja hambatan yang dialami oleh pihak manajemen komunitas dalam mengawasi mutu dan harga barang dan jasa yang ditawarkan kepada wisatawan? 42. Apa saja hambatan yang dialami dalam menjaga agar harga barang dan jasa yang ditawarkan kepada wisatawan tetap wajar dan terjangkau bagi wisatawan?
	7) Pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang menarik	Atraksi menarik	43. Apa saja hambatan yang dialami oleh pihak manajemen komunitas dalam merancang atraksi menarik untuk para wisatawan?

			44. Apa saja hambatan yang dialami oleh pihak manajemen komunitas dalam menentukan jenis-jenis atraksi yang menarik untuk wisatawan?
	8) Kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup	Lingkungan hidup bersih dan sehat	45. Apa saja hambatan yang dialami oleh pihak manajemen komunitas dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi wisatawan? 46. Apa saja hambatan yang dialami oleh pihak manajemen komunitas dalam melibatkan komunitas untuk menjaga lingkungan hidup bersih dan sehat?
<b>Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan selama pelaksanaan manajemen komunitas dalam pengembangan Wisata Kawasan Kaliadem?</b>	<b>Manajemen Komunitas:</b> Kemampuan masyarakat atau komunitas untuk memiliki tanggung jawab, otoritas, dan pengendalian terhadap arah pembangunan yang akan mempengaruhi kehidupannya sendiri		
	<b>Tanggung jawab:</b> Komunitas mengambil alih kepemilikan dan kewajiban untuk sistem	Mampu mengambil alih kepemilikan, kewajiban untuk sistem	44. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam pengambilalihan kepemilikan obyek Wisata Kawasan Kaliadem? 45. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan yang dialami oleh pemilik dalam mengembangkan obyek Wisata Kawasan Kaliadem sesuai dengan tanggung jawabnya? 46. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam pembagian kewajiban dan tanggung jawab komunitas guna mengembangkan obyek Wisata Kawasan Kaliadem?

<p><b>Otoritas:</b> Komunitas memiliki hak yang sah untuk membuat keputusan mengenai sistem</p>	<p>Hak yang sah, membuat keputusan</p>	<p>47. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam proses pembuatan keputusan yang ada di Wisata Kawasan Kaliadem? 48. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam menjangkau aspirasi dan gagasan semua anggota komunitas dalam proses pembuatan keputusan?</p>
<p><b>Pengendalian:</b> Masyarakat mampu melaksanakan dan menentukan hasil keputusannya</p>	<p>Mampu melaksanakan, menentukan hasil keputusan</p>	<p>49. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam pelaksanaan keputusan terkait pengembangan obyek Wisata Kawasan Kaliadem? 50. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan terhadap hasil pelaksanaan keputusannya tidak sesuai dengan keputusan bersama?</p>
<p><b>Usaha yang perlu dilakukan dalam hal pengembangan pariwisata:</b></p>		
<p>1) Promosi untuk memperkenalkan obyek dan kawasan wisata</p>	<p>Promosi</p>	<p>51. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam mempromosikan Wisata Kawasan Kaliadem? 52. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam merancang promosi Wisata Kawasan Kaliadem?</p>
<p>2) Transportasi yang lancar</p>	<p>Kelancaran transportasi</p>	<p>53. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam menata sarana dan prasarana transportasi menuju Wisata Kawasan Kaliadem?</p>
<p>3) Kemudahan keimigrasian atau birokrasi</p>	<p>Kemudahan imigrasi dan birokrasi</p>	<p>54. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam memberikan kemudahan kepada wisatawan? 55. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam menentukan</p>

			retribusi bagi wisatawan luar negeri?
4) Akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman	Akomodasi nyaman		56. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam merancang akomodasi yang nyaman bagi wisatawan? 57. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam menentukan kriteria akomodasi yang nyaman bagi wisatawan?
5) Pemandu wisata yang cakap	Pemandu wisata cakap		55. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam upaya menentukan pemandu wisata beserta dengan tarifnya? 56. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam menentukan kriteria pemandu wisata?
6) Penawaran barang barang dan jasa dengan mutu terjamin dan tarif harga yang wajar	Barang dan jasa bermutu dengan harga wajar		56. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam mengawasi harga barang dan jasa yang ditawarkan kepada wisatawan? 57. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam menentukan penanggung jawab untuk mengawasi mutu dan harga barang?
7) Pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang menarik	Atraksi menarik		58. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam merancang atraksi untuk para wisatawan? 59. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam menentukan penanggung jawab dalam merancang atraksi?
8) Kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup	Lingkungan hidup bersih dan sehat		60. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam menata lingkungan hidup yang bersih dan sehat bagi wisatawan? 61. Bagaimana pihak manajemen komunitas mengatasi hambatan dalam menentukan penanggung jawab dalam

			menciptakan lingkungan hidup bersih dan sehat?
--	--	--	------------------------------------------------



## TRANSKRIP WAWANCARA

**Nama** : Heri Suprpto  
**Jabatan** : Kepala Desa Kepuharjo  
**Tanggal** : 4 November 2021  
**Tempat** : Balai Desa Kepuharjo

P : Selamat siang, Pak Heri. Perkenalkan saya Kevin yang beberapa hari lalu menghubungi Bapak untuk keperluan penelitian saya. Saya mohon izin untuk menyita sedikit waktu Bapak untuk kemudian saya tanyakan beberapa hal terkait penelitian saya ini.

N : Oh iya mas Kevin, monggo silakan aja mas, gimana mas? Apa yang bisa saya bantu?

P : Begini Pak, melanjutkan pembicaraan kita tempo lalu bahwa saya berencana untuk mewawancarai Bapak mengenai pengembangan pariwisata di kawasan Kaliadem ini Pak.

N : Oke mas, silakan aja.

P : Saya ingin memulai pertanyaan dari ini saja dulu Pak, bagaimana awal mula pembentukan Wisata Kawasan Kaliadem ini?

N : Sebenarnya untuk Wisata Kawasan Kaliadem ini kan sudah ada sejak ini mas tahun 90-an apa ya kalau ngga salah. Dulu itu belum ada bunkernya mas. Bunker itu kan adanya baru dibangun itu dari tahun 2001. Dulu itu Kaliadem itu kawasan wisata alam pemandangan gitu aja mas, sekarang kan ditambah adanya bunker itu makanya makin banyak kunjungan wisatawan ke sana. Wisata Kawasan Kaliadem ini baru dibuka mulai tahun 2012 setelah merapi erupsi. Sejak erupsi itu, jalannya kebanyakan rusak dan terkubur material erupsi itu, tebal sekali.

P : Maaf saya potong Pak. Lalu, bagaimana proses memulainya Pak?

N : Nah, itu dulu karena saya sebagai Kepala Desa, jadi melihat kondisi ini kan harus segera diperbaiki to mas, biasanya kan memang seperti itu, jadi pemerintah harus tanggap untuk memperbaiki kawasan yang rusak dan itu di Kaliadem ini. Saya sebagai Kepala Desa mesti mulai memikirkan bagaimana melakukan perbaikan kawasan ini. Dulu itu saya ajak pemerintah desa dan

masyarakat untuk turut terlibat di sini. Pemdes punya tanggung jawab untuk menyusun rencana perbaikan dan pengadaan biayanya, kalau masyarakat itu bertanggung jawab dalam hal penataan kawasan itu mas. Jadi, masyarakat itu saya arahkan untuk jadi tenaga kerja buat nyelesain perbaikan ini.

P : Kira-kira berapa lama proses perbaikan ini dilakukan Pak?

N : Saya kira itu ada hampir setahunan lebih mas.

P : Apa yang membuat bisa sedemikian lama Pak?

N : Ya memang pada waktu itu fasilitas umum di sini itu ya rusak sekali mas, bahkan jalan raya itu tertimbun material erupsi lima *centimeter* lebih dan itu berapa kilometer mas. Selain itu ya masalah dana perbaikan yang memang minim sekali mas. Pemdes memang punya anggaran dana, tapi kan peruntukannya bukan untuk itu semua mas, apalagi perbaikan kawasan ini kan memang dirancang untuk pengembangan pariwisata juga.

P : Oh memang inisiasi awalnya memang untuk mengembalikan pemanfaatan kawasan Kaliadem menjadi kawasan wisata lagi ya Pak?

N : Betul mas, jadi perbaikan ini bukan semata-mata untuk ya diperbaiki gitu tok, tapi kita usahakan buat kembalikan fungsi kawasan Kaliadem sebagai kawasan wisata juga mas, jadi itu kami lakukan secara bersamaan lah mas.

P : Oke baik Pak. Lalu ada hambatan ngga Pak waktu perbaikan ini dilakukan?

N : Kalau hambatan itu ya sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu mas, masalah dana tadi, makanya saya dan masyarakat harus membentuk kerja sama dengan itu loh mas pengusaha *jeep* sama pengusaha tambang itu supaya lebih memudahkan masyarakat buat memperbaiki kawasan ini, kira-kira begitulah mas.

P : Bagaimana skema yang dilakukan Pak?

N : Jadi waktu itu saya dan masyarakat punya inisiatif untuk memanfaatkan aset mereka mas, misal kayak pengusaha tambang itu kan punya alat-alat berat to, ya itu kita pakai mas. Selain itu kami menawarkan skema pengenaan retribusi buat semua kendaraan tambang dan *jeep* apabila melewati jalan kawasan Kaliadem harus membayarkan sekian rupiah. Jadi, dengan dana seadanya, pemdes dan masyarakat itu ya maju aja mas memperbaiki kawasan ini, selanjutnya kekurangan dana ini kan bisa ditutupi pakai retribusi tadi.

P : Lalu, setelah perbaikan kawasan ini selesai, tadi kan Bapak sampaikan juga bahwa ada upaya mengembangkan kawasan Kaliadem jadi kawasan wisata lagi itu bagaimana Pak?

N : Ya sebenarnya gini mas, setelah erupsi itu kan kondisi ekonomi masyarakat saya lihat sangat hancur sekali. Karena Kaliadem ini kan di daerah ketinggian dan juga lintasan menuju kawasan merapi, jadi arus kedatangan orang-orang luar kota kan banyak mas, di situ saya banyak lihat masyarakat ini jadi memintaminta sumbangan di pinggir jalan gitu mas, padahal ngga ada jalan yang diperbaiki juga. Jadi dulu itu saya kerahkan saja masyarakat-masyarakat ini untuk menyetop kegiatan itu, kita fokus aja ke arah mengembangkan kawasan Kaliadem saja dan pelan-pelan masyarakat mulai punya dorongan untuk terlibat di dalam pengembangan pariwisata ini mas. Setelah kami buka forum, ya saya serahkan pengelolaan kawasan ini ke masyarakat.

P : Jadi, ini semua memang atas inisiatif Bapak saja atau bagaimana Pak?

N : Ya bukan karena saya juga mas, ini semua juga karena didorong sama masyarakat. Mereka merasa kalau tidak ada lagi mata pencaharian, pertanian mereka hancur, ternak habis, jadi mereka mendorong saya juga untuk ya sudah itu bunker dimanfaatkan lagi saja untuk jadi kawasan wisata.

P : Memangnya tidak ada larangan waktu itu Pak? Ya kawasan ini kan dekat dengan merapi, apakah tidak akan membahayakan?

N : Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Pak Bupati pada waktu itu melarang mas, alasannya karena Kaliadem ini Kawasan Rawan Bencana (KRB) III sangat beresiko dengan Merapi yang waktu itu belum stabil mas.

P : Lalu, apakah ada langkah yang ditempuh oleh komunitas atau pemerintah desa pada waktu itu Pak?

N : Saya mendapat doronganlah dari masyarakat agar kawasan ini tetap dibuka untuk kawasan wisata. Masyarakat pada waktu itu mengajak saya untuk hadir di dalam forum pertemuan mereka. Meskipun dilarang, hasil pertemuan pemerintah desa dengan masyarakat tetap mengharuskan kami untuk membuka kawasan ini jadi kawasan wisata, mas. Ya ini memang agar ekonomi masyarakat pulih pasca erupsi itu. Jadi, kalau alasan dilarangnya karena ancaman bahaya merapi, kami jamin kalau itu bisa kami atasi bersama dan

tidak akan mengganggu aktivitas wisata. Ya dari situ, kami mulai buka kawasan ini, kami buat aturan retribusinya, kami gandeng kelompok *jeep* wisata. Intinya ya berani-beranian saja waktu itu mas, buktinya sekarang ini ngga ada larangan lagi, karena aktivitas yang kami jalankan tidak hanya membawa dampak bagi masyarakat tapi buat pendapatan daerah juga mas Jadi saya sebagai pemerintah desa juga ya berusaha untuk menjadi penyambung aspirasi mereka ke pemerintah kabupaten apabila sewaktu-waktu aktivitas ini kembali mendapat peringatan dari pemerintah kabupaten.

P : Setelah itu kira-kira ada peringatan ngga Pak?

N : Ada mas, jelas ada. Waktu itu Pemkab Sleman tiba-tiba kasi peringatan kalau persiapan pembukaan kawasan Kaliadem harus dihentikan, retribusi juga harus dihentikan. Seingat saya kami itu sampai di SP III kan mas. Dari situ saya undang wartawan biar semakin ramai di medsos, bikin orang penasaran bagaimana kejadian yang terjadi dan otomatis kan kawasan Kaliadem juga makin terkenal to mas hehehe. Ya sampai sekarang tidak ada tindak lanjut itu mas setelah SP III diberikan ke kami, aktivitas di sini tetap jalan dan ngga ada larangan-larangan.

P : Lalu, apabila berbicara mengenai status kepemilikan Wisata Kawasan Kaliadem ini bagaimana Pak?

N : Wisata Kawasan Kaliadem ini berada di tanah kas milik desa mas, jadi desa itu memberlakukan sistem sewa tanah untuk pedagang dan pengusaha *jeep* di sana. Nah, hasil dari penarikan sewa ini nanti akan dikelola untuk kepentingan kawasan wisata mas. Kalau pengelolaan kawasan secara keseluruhan itu ya langsung sama komunitas, mereka semua itu yang kelola.

P : Apakah ada perbedaan tugas Pak antara pemerintah desa dengan komunitas?

N : Kalau perbedaan saya rasa hanya itu aja ya mas, pemerintah desa menarik uang sewa untuk kios pedagang dan *jeep* itu, lain daripada itu baik pengelolaan dan lain-lain itu komunitas yang kelola mas, mereka yang paling aktif untuk menyusun perencanaan di sana.

P : Untuk Wisata Kawasan Kaliadem ini ada obyek wisata apa saja Pak?

N : Di sini cuma ada bunker itu aja mas dan di Kepuharjo ini, bunker itu yang paling ramai tingkat kunjungannya, nanti mas bisa minta datanya ke ketua komunitas ya.

P : Tapi, meskipun hanya satu saja, apakah beroperasi dengan baik Pak?

N : Saya rasa Wisata Kawasan Kaliadem ini jadi prioritas wisatawan kalau berkunjung ke wilayah merapi. Sejak awal memang kelompok *jeep* itu sudah menentukan rute perjalanan mereka dan melibatkan kawasan Kaliadem, dari sini kelompok *jeep* juga akan turut mempromosikan kawasan ini kepada wisatawan, bagaimana rutanya dan apa saja yang ada di dalamnya.

P : Kalau memang komunitas yang menjadi pengelola di kawasan ini, berarti mereka memiliki hak untuk menentukan keputusan, apakah begitu Pak?

N : Tentu mas, contohnya soal retribusi tiket masuk Wisata Kawasan Kaliadem, nah yang terlibat di dalam pembuatan keputusan itu ya komunitas mas. Mereka ini kan pengelola, otomatis mereka memiliki perencanaan untuk mengelola kawasan ini. Misalnya, untuk memasuki kawasan Kaliadem itu kan di awal harus melewati pintu masuk Wisata Kawasan Kepuharjo, di sana itu dikutip Rp 3.000,- per orang. Apabila wisatawan ingin melanjutkan perjalanan ke kawasan Kaliadem, maka mereka akan diminta membayar Rp 3.000,- untuk parkir kendaraan bermotor. Selain itu, untuk *jeep* yang singgah di kawasan Kaliadem juga kita tarik retribusinya sebanyak Rp 10.000,- per *jeep*. Aturan ini semua sudah jelas diputuskan mas dan itu melewati proses diskusi dengan komunitas dan kelompok *jeep* wisata.

P : Setelah keputusan tersebut dijalankan, apakah ada hambatan yang dirasakan Pak?

N : Ada mas. Dulu saya pernah didatangi sama teman-teman dari *jeep* itu bilang kalau bagaimana mereka bayar retribusi itu seadanya saja, ya pastinya saya menolak mas karena kan kita sudah buat peraturan desanya, sekian jumlahnya untuk retribusi. Ternyata ngga lama setelah itu, saya dapat laporan kalau ada kecurangan di antara petugas dan supir *jeep* dan sepengetahuan di lapangan benar seperti itu. Solusi yang kita lakukan saat ada temuan seperti itu ya dengan mengaudit data tiket yang tercetak dengan pendapatan saja, mas. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah desa tentu mengambil sikap

agar menambahkan petugas keamanan di pos pintu masuk buat nge-cek karcisnya. Ini dilakukan agar kecurangan tidak terjadi lagi.

P : Kira-kira ada tidak Pak pihak di luar komunitas atau pemerintah desa yang membuat peraturan di sini? Kalau ada, peraturan tentang apa Pak?

N : Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pariwisata membuat peraturan mengenai retribusi tiket masuk mas. Pemkab itu buat aturan ke kita kalau pajak retribusi itu besarnya 40 persen, selebihnya itu untuk kita, mas. Sekian tahun Wisata Kawasan Kaliadem beroperasi, sekian tahun juga kita setorkan pajak ke pemkab, tapi yang saya bingung adalah regulasi pemerintah di sini tidak pernah jelas. Pemerintah menerima pajak dari hasil aktivitas wisata, tapi nihil kontribusi terhadap pemenuhan aksesibilitas kawasan, terutama jalan. Alhasil yang perbaiki jalan ya tetap kami mas, pemkab tidak pernah memberikan kontribusinya untuk itu.

P : Di awal tadi melarang, tapi makin ke sini menarik pajak retribusi juga ya Pak?

N : Ya mungkin karena kawasan Kaliadem memang memiliki jumlah pengunjung yang tidak biasa mas, selalu ramai. Kami juga harusnya sadar bahwa aktivitas ini memiliki kewajiban pajak, karena ada jual beli tiket to. Hanya saja, saya mau tekankan bahwa meskipun menarik pajak dari sektor pariwisata ini, maunya pemerintah kabupaten melakukan pembangunan juga di kawasan ini, jadi tidak semua fasilitas itu harus dibangun dari kas komunitas atau desa.

P : Oh begitu ya Pak. Saya mau mundur ke belakang dulu Pak. Sejak kawasan ini akan dibuka menjadi kawasan wisata, apakah ada langkah-langkah konkret yang harus dipersiapkan oleh pemerintah desa mungkin atau komunitas dalam menggaet wisatawan misalnya melalui peran promosi Pak?

N : Kalau promosi itu sebenarnya sudah dilakukan sama kelompok *jeep* mas, karena kan mereka agen perjalanan di kawasan ini, jadi otomatis mereka harus membuat denah perjalanan atau menawarkan trip perjalanan ke wisatawan, jadi promosi kawasan ini ya dari kelompok *jeep* itu mas, komunitas itu hanya berfokus ke pengelolaan saja.

P : Berarti kalau bicara transportasi menuju kawasan ini sudah lengkap dan dapat dilalui ya Pak?

N : Jelas sudah mas. Kalau wisatawan tidak mau menggunakan moda transportasi *jeep*, mereka bisa menggunakan motor atau mobil yang mereka punya, toh fasilitas jalan di sini kan sudah bagus ya mas, sudah aspal semua.

P : Kalau akomodasi buat penginapan kira-kira ada tidak ya Pak?

N : Kalau di Kaliadem itu ngga ada mas, biasanya wisatawan itu menginap di Kaliurang itu loh mas, kan banyak penginapan di sana, hotel atau *homestay*. Kaliadem itu cuma buat arena rekreasi saja mas.

P : Ada tidak Pak usaha menggaet pihak pemerintah selain Pemda, seperti Kementerian untuk mendukung pengembangan pariwisata di kawasan ini?

N : Kalau sekarang itu pengennya kan bikin BUMDes, syaratnya kan gitu supaya lebih terorganisasi. Tapi kalau bikin BUMDes, itu kan ada undang-undangnya mas. Saya pikir kalau dibentuk jadi BUMDes, cara mengelolanya kan jadi berubah juga mas, kalau saya yang penting ngelolanya dengan benar kayak sekian ini jatahnya desa ya dikerjakan oleh desa, sekian ini jatahnya pengelola ya dikerjakan oleh pengelola, saya kira itu saja kok mas. Saya sudah mikir kok mas kalau semisal dibuatkan jadi BUMDes, pengelolaan kawasan ini kan bakal mendapat kucuran dana dari pemerintah. Kalau semisal kita tidak buat, otomatis tidak dapat dana, tapi kalau kita mampu mengelola keuangan kita masyarakat dengan baik, menurut saya itu sudah cukup oke kok mas. Soalnya kalau dihitung-hitung penghasilan yang diterima masyarakat dandesa menurut saya kalau diakumulasikan ada kok mas sampai ratusan juta. Tapi kan kalau semisal kita bicara BUMDes tadi, kehadirannya apa bisa memakmurkan masyarakat apa ngga mas? Ya jawabannya belum tentu mas, mungkin pengurus atau beberapa orang saja. Kalau saya ditanya ada apa ngga rencana mau bikin BUMDes, ya mungkin ada. Tapi kalau cara pengelolaan obyek wisata mau diubah, saya dan komunitas sepertinya tidak pengen mas.

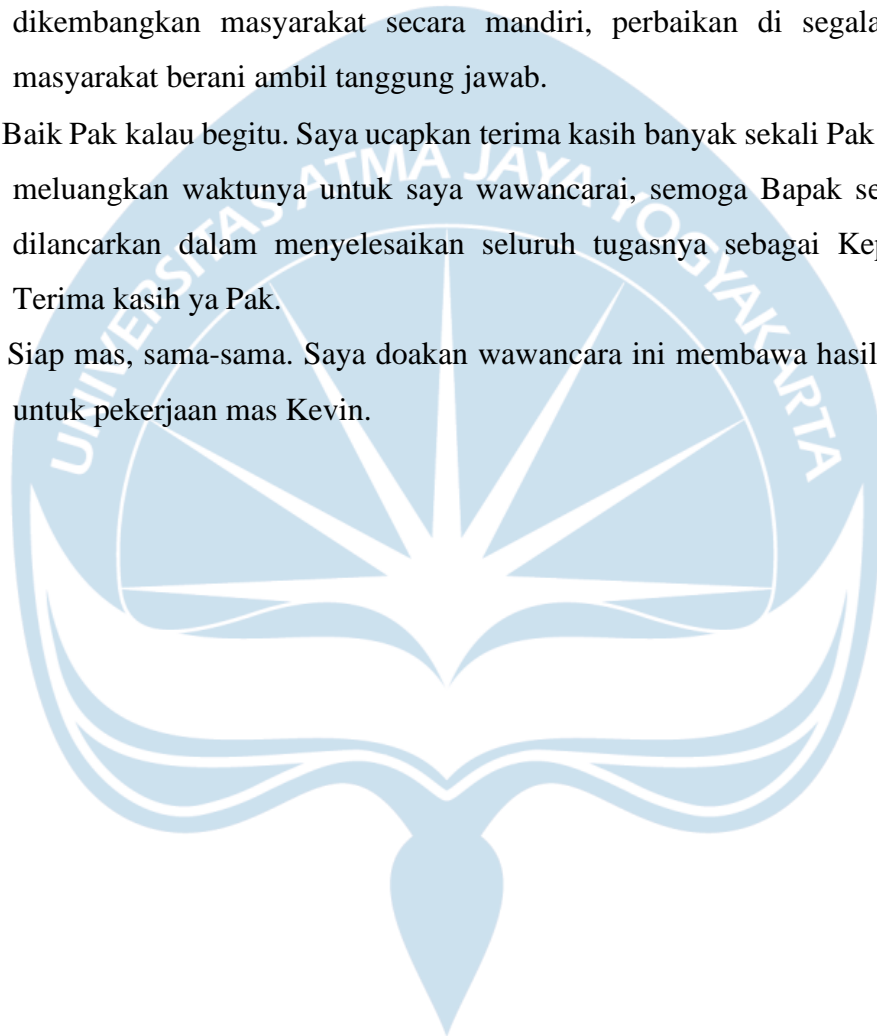
P : Terakhir Pak. Selama Wisata Kawasan Kaliadem ini beroperasi, kira-kira ada tidak Pak hambatan terbesar yang dirasakan? Apa harapan Bapak untuk itu?

N : Kalau hambatan saya rasa selalu ada ya mas, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mungkin itu saja mas. Ya misalnya itu tadi mas, regulasi dari pemerintah kok ya ngga jelas, kok kawasan ini ngga disentuh sama pemerintah, tapi kok pajaknya diminta? Ya saya pengennya kalau di sini dimintain pajak,

harusnya ya tanggung jawab, jalannya dibenerin, lampu penerangandibenerin, biar semuanya serba sebanding, lha ini kan rasanya ngga sebanding mas. Itu aja mas. Selama ini kan yang bikin perbaikan di sini kan ya desa sama masyarakat mas. Jadi, desa itu nanti sudah menganggarkan sekian, terus nanti dari pengelola obyek wisata juga sudah menganggarkan sekian persen dari pendapatannya, ya saya bisa bilang kalau potensi yang ada di desa ini ya dikembangkan masyarakat secara mandiri, perbaikan di segala sisi juga masyarakat berani ambil tanggung jawab.

P : Baik Pak kalau begitu. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali Pak Heri sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai, semoga Bapak sehat selalu, dilancarkan dalam menyelesaikan seluruh tugasnya sebagai Kepala Desa. Terima kasih ya Pak.

N : Siap mas, sama-sama. Saya doakan wawancara ini membawa hasil yang baik untuk pekerjaan mas Kevin.



## **TRANSKRIP WAWANCARA**

**Nama : Wiyana Suhadi**  
**Jabatan : Ketua Komunitas Pengelola Wisata Kawasan Kaliadem**  
**Tanggal : 4 November 2021**  
**Tempat : Rumah Bapak Wiyana Suhadi, Desa Kepuharjo**

P : Selamat siang, Pak Wiyana. Saya mohon izin Pak untuk melakukan wawancara bersama Bapak, sesuai dengan apa yang kemarin saya bahas dengan Bapak. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak perihal pengembangan Wisata Kawasan Kaliadem, maka dari itu saya mohon izin untuk menyita waktu Bapak sedikit tidak apa-apa kan Pak?

N : Monggo mas, silakan, mumpung saya juga sedang tidak ada pekerjaan juga di siang ini hehehe.

P : Saya ingin memulai dari sini saja dulu Pak, sudah berapa lama menjadi ketua komunitas wisata ini?

N : Saya kalau ngga salah itu sudah hampir empat tahun mas, tapi saya udah terlibat dari tahun 2012 mas.

P : Bagaimana dinamika yang terjadi selama Bapak turut andil di dalam pengembangan pariwisata ini?

N : Kalau saya pribadi memang ya karena sudah jadi bagian dari tugas saya, ya saya rasa cukup menikmati ya mas hehehe. Kalau ditanya masalah komunitas, ya kami tetap jalan saja sampai hari ini, ya masih sering bertemu rapat, diskusi gitu mas.

P : Internalnya bagus berarti ya Pak? Hehehehe.

N : Ngga ada masalah kalau menurut saya mas.

P : Oh iya Pak, untuk tiket masuk Wisata Kawasan Kaliadem ini nominalnya berapa ya Pak?

N : Untuk wisatawan itu nanti mereka akan membayar retribusi tiket di pintu masuk Desa Kepuharjo, kalau wisatawan umum itu bayar Rp 3000,- per orang, kalau ada dua orang berboncengan menggunakan motor itu jadinya bayar Rp 5000,- mas. Kalau semisal pakai mobil atau bus itu hitungnya per orang mas.

Nah, kalau mereka mau ke Wisata Kawasan Kaliadem, mereka cuma bayar uang parkir saja.

P : Kalau wisatawan luar negeri bagaimana Pak?

N : Sama mas, mereka bakal membayar tiket itu di pintu masuk, hanya saja yang membedakan itu mereka bayarnya Rp 15.000,- per orangnya.

P : Oh gitu ya Pak. Sekarang ini, kira-kira banyak tidak Pak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata ini?

N : Sepertinya ngga sampai 50 persen mas. Kalau di Wisata Kawasan Kaliadem itu kira-kira ada 20 orang mas yang jadi petugas wisata di sana. Karena di Desa Kepuharjo ini kan ada sekitar delapan obyek wisata mas, dan salah satunya itu Wisata Kawasan Kaliadem mas, jadi masyarakat di sini itu ya dibagi ke dalam obyek-obyek wisata tadi semua mas. Sekarang itu karena kondisinya sudah stabil, jadi masyarakat itu sudah ada yang kembali aktif di tambang pasir dan batu, ada yang sudah aktif bertani, beternak, gitu mas.

P : Ada kriteria tertentu tidak Pak dalam menentukan anggota-anggota komunitas wisata ini?

N : Tentu tidak mas, ya kita terbuka saja, siapa yang mau ikut ya silahkan, gitu mas. Masyarakat di sini juga saya rasa sudah loyal lah mas dalam bekerja, jadi ya tidak sampai dalam proses seleksi yang begitu ketat, mereka ini sudah mandiri untuk menjalankan kewajiban yang sudah sesuai dengan pekerjaan mereka.

P : Baik Pak, saya mau tanya ini saja, bagaimana sebenarnya proses awal dalam pembentukan Wisata Kawasan Kaliadem ini?

N : Sebenarnya untuk Wisata Kawasan Kaliadem ini kan sudah ada sejak ini mas tahun 90-an apa ya kalau ngga salah. Jadi dulu itu bunker yang sekarang ini jadi obyek wisata kawasan Kaliadem itu belum ada mas. Bunker ini baru dibangun tahun 2001. Jadi dulu itu kawasan Kaliadem ini kan punya potensi untuk pariwisata lah mas, wisatawan itu sering ke sini ya hanya buat rekreasi dan memang kawasan ini kan ada di ketinggian dan dekat banget sama merapi, ini kita jaraknya cuma tiga kilometer mas, sangat dekat. Orang-orang itu datang ke sini hanya cuma buat nikmatin udara segar, melihat pemandangan kota dari sini, gitu aja mas mayoritas.

P : Tapi seiring berjalannya waktu pasti ada dampak dari merapi kan Pak?

Terutama beberapa tahun belakangan ini kan ada erupsi besar Pak?

N : Betul mas. Menyambung apa yang mas tanyakan di awal tadi itu, jadi gini, Kaliadem ini jadi wilayah yang paling parah karena letusan merapi itu. Dulu itu masyarakat di sini asli seperti jatuh miskin mas, ternaknya habis, pertaniannya habis juga, aktivitas wisata apalagi. Jadi, sembari pemerintah desa memperbaiki kawasan ini, nah muncul dorongan dari masyarakat dan pemerintah desa juga tentang bagaimana kalau Kaliadem dikembalikan lagi fungsinya jadi kawasan wisata, gitu mas. Jadi waktu kawasan ini diperbaiki, ya sebagian masyarakat udah mulai merancang pengembangan Kaliadem itu dan sampai 2012 itu barulah Wisata Kawasan Kaliadem boleh beroperasi.

P : Berapa lama persiapan ini ditempuh Pak?

N : Kira-kira hampir dua tahun mas. Ini lamanya karena perbaikan fasilitas jalan itu kok mas. Perbaikan jalan ini kan penting ya karena pasti akan lebih memudahkan akses wisatawan, makanya kita harus menunggu jalannya selesai dulu karena waktu itu jalannya wah sangat rusak sekali mas, itu jalan sampai lima centimeter lebih kayaknya tertimbun material erupsi.

P : Berarti sampai sekarang ini, obyek wisata di kawasan Kaliadem itu cuma bunker itu saja ya Pak?

N : Betul mas, hanya bunker saja.

P : Sepengetahuan Bapak, berapa jumlah wisatawan yang datang ke sini setiap tahunnya Pak?

N : Wah kalau itu ribuan mas setiap tahunnya, nanti datanya saya kasi ke masnya kalau perlu.

P : Kenapa bisa sampai ribuan kunjungan Pak? Padahal tadi Bapak sampaikan obyek wisatanya cuma bunker saja?

N : Seperti yang saya bilang tadi itu mas, kawasan Kaliadem itu kan ada di ketinggian, dekat sama merapi dan bisa melihat pemandangan kota jogja dari Kaliadem itu. Jadi bagi wisatawan terkadang mereka datang bukan hanya untuk melihat bunker itu saja, tapi mayoritas untuk melihat pemandangan dari ketinggian, menikmati cuaca yang dingin dan adem gitu mas.

P : Oh begitu ya Pak. Lalu, selama proses persiapan pembukaan kawasan wisata ini, kira-kira ada hambatan lain tidak Pak waktu itu?

N : Kita itu dulu terkendala di masalah pendanaan mas. Kalau dari pemerintah desa waktu itu mereka mengakui bahwa mereka punya dana di kas mereka, cuma itu peruntukannya bukan buat pariwisata. Nah waktu itu dana yang mereka punya tidak bisa dicairkan untuk pengembangan kawasan ini karena dana mereka itu sudah difokuskan untuk mitigasi bencana, ya bakalan jadi temuan kalau semisal dipakai untuk pariwisata to mas. Itu dulu kita dilarang sama Pak Bupati kok mas waktu kawasan ini mau dibuka kembali untuk jadi kawasan wisata, alasannya itu karena Kaliadem itu berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, jadi tidak boleh ada aktivitas di sana. Ya jadi pada waktu itu masyarakat keras-kerasan saja untuk tetap melanjutkan perencanaan pengembangan kawasan itu. Ya mau gimana, mata pencaharian tidak ada, sumber daya yang bisa dimanfaatkan pada waktu itu ya cuma wisata ini. Jadi waktu itu, karena ada rapat pertemuan juga membahas tentang larangan ini, masyarakat ya pengen tetap maju saja mas, ya harapannya pemerintah desa juga ada bersama mereka dan memang pemerintah desa mendukung masyarakat juga di sini.

N : Lalu apa saja solusi yang ditempuh komunitas waktu itu dalam mengatasi persoalan dana ini Pak?

P : Nah waktu itu kita melakukan pertemuan bersama internal komunitas dan melibatkan pemerintah desa juga mas, jadi solusi yang ditempuh waktu itu ya dengan mengajak pengusaha tambang dan *jeep* wisata untuk sama-sama berkontribusi dalam menutupi pendanaan ini. Cara yang ditawarkan waktu itu dengan membuat aturan retribusi tiket masuk buat semua kendaraan tambang dan wisata. Mereka ini kan pasti lewat dari jalan yang dibangun sama kami, jadi menurut kami mereka perlu untuk membayar retribusi bagi setiap kendaraan perusahaan mereka yang melewati jalan ini.

N : Lalu bagaimana tanggapan para pengusaha-pengusaha tersebut pada waktu itu Pak?

P : Mereka secara terbuka mau mendukung solusi ini mas. Ya keuntungannya jelas juga, di mana mereka ngga lewat dari jalan rusak lagi, akses mereka lancar dan

lebih cepat dari biasanya, otomatis berpengaruh juga to sama produksi mereka dan yang mereka bayarkan ngga banyak kok mas, cuma Rp 15.000,- untuk setiap truk. Kalau untuk *jeep* itu mereka diminta retribusi di tiap obyek wisata di Desa Kepuharjo ini, Kaliadem juga termasuk. Mereka ini ditarik retribusinya sebanyak Rp 5000,- per kendaraan *jeep* itu.

P : Berarti untuk sekarang akses menuju kawasan wisata ini sudah bagus dong ya Pak dan itu hasil dari kerjasama dengan pihak-pihak terkait ya Pak?

N : Benar mas. Kalau sekarang ini sudah sangat bagus malah mas, itu jalannya semua di aspal, ada yang dicor beton tebal itu dan yang pastinya bisa dilewati sama semua kendaraan ringan sampai kendaraan berat. Kendaraan beratnya itu maksudnya kendaraan tambang itu mas, truk itu kan ngangkut puluhan ton tanah dan batuan setiap harinya dan itu puluhan truk juga setiap hari.

P : Oh berarti itu ya Pak maksud dari penarikan retribusi buat truk tambang itu supaya mereka bisa lewat jalan yang dibangun sama pemerintah desa dan masyarakat Kaliadem itu ya?

N : Iya mas, mereka membayar retribusi wajib setiap truk mereka lewat dan itu dipakai buat perbaikan jalan ini dan sebagiannya disisihkan untuk pengembangan wisata.

P : Di sini ada tidak Pak semacam penginapan untuk wisatawan gitu Pak?

N : Wah kalau itu belum ada mas. Kebanyakan wisatawan itu menginap di Kaliurang itu loh mas, kan banyak villa, homestay sama hotel kan di sana. Kalau Kaliadem ini cuma arena wisata aja mas buat wisatawan, akomodasi penginapan itu ada di Kaliurang itu mas.

P : Kalau dilihat dari segi kepemilikan Wisata Kawasan Kaliadem ini bagaimana Pak?

N : Sebetulnya kalau dilihat dari segi penggunaan lahan, ini lahan kan tanah kas desa mas dan pemerintah desa di sini menetapkan adanya penarikan sewa untuk kios dagang dan sebagiannya lagi dari *jeep* wisata itu mas. Misalnya untuk harga sewa kios dagang itu hanya Rp 100.000,- per tahunnya mas. Tapi, untuk pengelolaannya itu dipegang sama masyarakat mas. Meskipun itu tanah kas desa, masyarakat punya kedudukan lah untuk membuat keputusan terhadap

pengelolaan kawasan Kaliadem dan keputusan terhadap pengelolaan obyek wisata ini mayoritas dikendalikan oleh komunitas.

P : Menurut Bapak, apa saja yang perlu dikaji dalam menentukan harga sewa tanah ini dulunya Pak? Kenapa begitu murah sekali dalam jangka waktu setahun?

N : Karena pada dasarnya untuk warga kan mas, jadi bagaimana mungkin skemanya harus lebih menguntungkan masyarakat dan tempatnya juga ngga lebar banget kok mas, cuma 4x6 meter persegi. Saya sebagai ketua komunitas memang merasa kecil sekali harga sewanya, cuma karena itu tanah milik kas desa, ya kebijakannya ada di pemerintah desa dan kuncinya tadi memang ya itu mas, lebih memberikan keuntungan kepada masyarakat. Itu kan di aturan desa juga udah tertera mas, per sekian meternya berapa gitu, sudah di atur mas. Sedangkan untuk ukuran kiosnya kan ada 4x6 meter ada yang 6x6 meter dan kebanyakan masyarakat di sana kan buka kios kelontong mas, makan dan minum, ada juga souvenir.

P : Siapa yang membangun kios dagang ini dulunya Pak?

N : Kios dagang itu dibangun sama pemerintah desa dan masyarakat mas lewat dana yang udah dikumpulkan sejak awal itu. Karena waktu itu kan Wisata Kawasan Kaliadem kan sudah akan dibuka, jadi bunker itu sudah direncanakan kalau kios itu harus dibangun untuk masyarakat yang mau menjadi pedagang di sana. Pemerintah desa itu ya menurunkan tanggung jawab ke komunitas untuk menarik retribusi dari pedagang itu untuk kemudian diberikan ke pemerintah desa.

P : Selain masyarakat, ada pihak lain tidak Pak yang turut menjadi penentu keputusan di sini?

N : Ada mas. Keputusan pengelolaan kawasan wisata ini kan memang mayoritas ditentukan sama komunitas, tapi kan ada minornya mas, ya itu pemerintah kabupaten. Misalnya kayak Pemkab Sleman itu kan menetapkan aturan kekita supaya pajak retribusi diberikan ke mereka sebanyak 40 persen mas. Keputusan ini bukan komunitas yang membuat, tapi Pemkab Sleman sendiri melalui peraturan daerah yang sudah ada. Tapi ini sepertinya memang berlaku di semua obyek wisata sih mas, jadi ya memang sudah menjadi aturan dari sana yang diturunkan ke setiap obyek wisata.

P : Berarti secara garis besar, Wisata Kawasan Kaliadem dikelola langsung sama masyarakat ya Pak? Lalu, bagaimana bisa masyarakat kemudian menjadi pengelola kawasan wisata ini Pak?

N : Ya benar mas. Di sini itu yang kelola masyarakat mas, mereka ini udah terlibat sejak awal kawasan wisata ini mulai digagas mas. Wisata Kawasan Kaliadem itu secara penuh dikelola langsung sama komunitas. Sebagai komunitas pengelola, kami punya tanggung jawab dalam mengatur segala hal yang ada di kawasan ini mulai dari melakukan perencanaan terhadap keberlangsungan kawasan wisata, melakukan pembersihan di kawasan dan monitoring terhadap pergerakan wisatawan. Ini adalah keharusan bagi komunitas sebagai bentuk dalam menjaga ekosistem pengelolaan kawasan Kaliadem

P : Bagaimana keterlibatan masyarakat waktu Wisata Kawasan Kaliadem itu mulai direncanakan Pak?

N : Masyarakat di sini itu awalnya menjadi tenaga kerja itu loh mas waktu perbaikan jalan karena erupsi itu. Saya rasa dimulai dari ikut gotong royong, dalam rapat-rapat juga mereka diikutsertakan, nah mulai dari sini peran masyarakat itu mulai ada. Mereka ini aktif untuk diskusi, mempersiapkan hal-hal penting untuk mulai menghidupkan kawasan Kaliadem dan mereka sangat mendorong pemerintah desa untuk ayo kita hidupkan lagi sektor pariwisata di kawasan Kaliadem, kira-kira gitu mas.

P : Hal apa saja yang dipersiapkan masyarakat waktu itu Pak?

N : Ada banyak hal yang harus dilakukan komunitas ketika mereka akan mulai mengelola kawasan ini, mas. Sebelum kawasan ini dibuka untuk aktivitas wisata itu, komunitas sudah merancang dulu bagaimana cara mempromosikan kawasan ini, bagaimana akses menuju kawasan, bagaimana ketentuan tarif untuk wisatawan, dan lain-lain, sehingga komunitas merasa siap untuk menerima kunjungan wisatawan, tidak asal jadi dan harus butuh pertimbangan.

P : Bagaimana bentuk promosi yang disusun Pak? Apakah masyarakat yang turun langsung?

N : Bukan mas, jadi di kawasan ini kan udah ada kelompok *jeep* wisata. Nah, komunitas itu menggandeng mereka untuk mempromosikan kawasan ini.

Kalau dilihat dari statusnya kan *jeep* wisata ini pasti punya alur perjalanan to mas, misal *jeep* itu bakal menawarkan wisatawan untuk ke kawasan Kaliadem, abis itu kemana, nah ini kan pasti udah ada di tawaran perjalanan mereka. Jadi, komunikasi antara komunitas dan kelompok *jeep* waktu itu ya bagaimana caranya supaya *jeep* wisata bisa membawa wisatawan ke Kaliadem, caranya itu ya dengan mengikutsertakan Kaliadem sebagai arena destinasi *jeep*.

P : Oke baik Pak. Terus, kalau memang masyarakat dilibatkan dalam membuat keputusan, merancang, dan lain-lain, apakah masyarakat konsisten untuk melakukan itu Pak?

N : Menurut saya, sektor pariwisata ini kan mata pencaharian masyarakat Kaliadem, jadi ekosistem pengelolaan yang ada itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat berkelanjutan. Dalam merancang dan membuat keputusan, anggota komunitas diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan tanggapan dan masukan. Biasanya, forum pertemuan yang diadakan itu pasti penuh dengan adu argumen dan untuk mengambil keputusan, kita pakai cara *voting* mas, di mana ketentuan *voting* harus melebihi separuh dari jumlah anggota keseluruhan yang hadir. Lewat hal-hal yang begini saja dulu yang perlu kita kuasai mas, karena kita ngga yang harus progresif terus mas, kalau dari hal-hal kecil saja kita sudah bagus, lebih dari itu saya rasa komunitas juga bisa nantinya. Sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kontribusi masyarakat itu sejak awal dimulai dari jadi tenaga kerja buat perbaikan mas, itu mereka kerjakan terus menerus hingga sekarang buahnya sudah terlihat dengan mereka menjadi pengelola Wisata Kawasan Kaliadem.

P : Apakah forum pertemuan dilaksanakan secara rutin Pak? Apa saja yang dibicarakan di dalamnya?

N : Forum pertemuan ini kita adakan minimal sekali dalam sebulan. Di sini, kami tidak hanya bicara tentang internal saja, tapi bagaimana kerja sama dengan pihak eksternal juga kami bicarakan di sini, mas. Di beberapa rapat itu pemerintah desa juga kita ikutkan mas. Kalau dilihat di dalam forum sih anggota komunitas cukup aktif untuk memberikan saran atau masukan, dan tidak ada batasan untuk itu, artinya semakin aktif ya semakin bagus, mas. Bedanya dengan saya, anggota komunitas kan hanya memberi masukan dan

meneruskan keputusan itu di lapangan, sedangkan saya sebagai ketua komunitas itu memiliki otoritas dalam menentukan keputusan yang disepakati oleh teman-teman.

P : Apa saja contoh pembicaraan yang dibahas dengan pihak eksternal Pak?

N : Seperti di awal tadi, promosi kawasan itu kan langsung menjadi urusan kelompok *jeep* wisata kan mas, karena kan secara sadar mereka itu agen wisata, otomatis harus promosiin wisata apa yang jadi basis mereka, iya kan mas? Nah dulu itu kami sempat ingin mempromosikan kawasan ini dengan cara kami sendiri, tapi anggota komunitas lebih menyarankan agar promosi kawasan dipegang oleh kelompok *jeep* wisata saja, sehingga fokus komunitas ya lebih ke pengelolaan di lapangan saja

P : Kira-kira ada hambatan ngga Pak selama forum pertemuan berlangsung?

N : Pasti ada mas. Terkadang di beberapa forum gitu, pembicaraan yang kami lakukan itu memakan waktu yang sangat panjang sekali, ya itu dilatarbelakangi sama banyaknya interupsi mas dari anggota. Komunitas memang memberikan wadah bagi anggotanya untuk memberikan saran dan masukan, tapi kalau tidak diatur, ini akan menghabiskan waktu, padahal kita perlu keputusan ini harus secepatnya ditentukan. Adu argumentasi yang berkepanjangan ini memang belum bisa kami hindarkan, karena ya namanya beda kepala pasti beda pemikiran kan mas.

P : Lalu, bagaimana sifat keputusan yang telah ditentukan oleh komunitas ini Pak? Apakah hanya mengikat komunitas atau mengikat pihak lain juga?

N : Semua keputusan yang sudah kita tentukan, sifatnya mengikat komunitas. Kalau keputusan sudah kita tetapkan, tidak lama setelah itu kami langsung eksekusi di lapangan, mas. Tapi, sebelum kita eksekusi, kita harus bahas bagaimana teknis pelaksanaannya, apa yang harus kita lakukan pertama kali. Misal, biasanya kami sering membahas tentang perbaikan akses jalan dan perbaikan di obyek wisata, otomatis kita harus cek dulu apakah anggarannya dalam beberapa hari ke depan sudah cair atau belum. Kalau urusan pendanaan, kita pasti koordinasikan dulu dengan pemerintah desa mas.

P : Bagaimana proses seiring berjalannya keputusan itu di lapangan Pak? Apakah selalu berjalan dengan baik dan tepat sasaran?

N : Tidak semua pekerjaan itu bisa kita jalankan dengan baik, mas. Di lapangan itu bisa saja kita temukan hasil pekerjaan akses jalan yang kurang rapi, ini terjadi mungkin karena kurangnya kesiapan dana kita, begitu juga untuk pemeliharaan obyek wisata. Tapi ini semua bisa kita atasi, mas. Biasanya kami melakukan evaluasi bersama internal, solusinya kita cari bersama.

P : Lalu, bagaimana cara komunitas melihat apakah keputusan yang telah dijalankan ini sesuai dengan target pekerjaan Pak?

N : Yang pasti kita melakukan proses monitoring ya mas untuk setiap pekerjaan yang sedang kami laksanakan. Misalnya di pintu masuk kawasan Kaliadem itu, saya dan komunitas sesekali melakukan pemantauan di pintu masuk kawasan Kaliadem. Di sana, kita sudah menentukan siapa saja anggota-anggota yang bertugas untuk itu. Petugas harus memberhentikan setiap pengendara yang ingin melewati pintu masuk dan mewajibkan mereka untuk membayar retribusi tiket masuk, kecuali masyarakat setempat. Selain itu, petugas parkir dan kebersihan di area kawasan wisata juga perlu untuk dimonitor. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara keputusan yang kita buat dengan kondisi petugas di lapangan, ya ini tentu jadi catatan perbaikan bagi kami, mas.

P : Bagaimana cara komunitas untuk menindaklanjuti persoalan apabila keputusan tersebut tidak sesuai dengan target dan harapan Pak?

N : Biasanya di dalam rapat pertemuan itu kami lakukan evaluasi mas, gunanya untuk melihat dan lebih mempertajam apa saja permasalahan di lapangan, membahas apa solusinya. Jadi, forum pertemuan itu benar-benar kita maksimalkan supaya pekerjaan kita kedepan lebih baik dan bagus.

P : Kalau dalam forum pertemuan ini, kira-kira ada permasalahan yang dirasa cukup menghambat tidak Pak?

N : Ada mas, biasanya itu kalau kita misalnya hari ini mau rapat to, nah itu kan dari jauh hari kan sudah ada pemberitahuan tentang jadwal, tapi pada saat rapat, anggota yang hadir malah sedikit banget, bahkan ngga sampai 50 persen kehadiran. Kalau kehadiran anggota komunitas tidak lebih dari 50 persen ya susah buat kita *voting* itu, mas. Ngga sering sih mas tapi pernah saja terjadi dan solusinya ya sebelum pertemuan dimulai kan kita absen dulu dan kalau kehadiran anggota tidak lebih dari 50 persen, buat apa kita lakukan pertemuan?

Jadi ini kan harus sesuai dengan aturan mas supaya kami yang hadir jugatidak dikira sesuka hati dalam membuat keputusan.

P : Lalu, apa yang akan ditempuh oleh komunitas kalau terjadi permasalahan kehadiran seperti ini Pak?

N : Sebenarnya kalau kehadiran anggota tidak lebih dari 50 persen, sulit bagi kami untuk menentukan keputusan mas. Aturan yang kami punya itu menyebutkan kalau keputusan bisa diambil kalau dihadiri lebih dari 50 persen anggota. Kalau kasus ini terjadi, komunitas harus menentukan ulang jadwal rapat dan itu harus wajib hadir, tidak ada kompromi. Kalau masih juga sedikit yang hadir, saya punya kewajiban untuk tetap melaksanakan pertemuan dan menentukan keputusan dengan dibantu oleh anggota komunitas yang hadir. Kadang kan anggota punya kesibukan, tapi di sisi lain toh jadwal kita selalu diadakan di luar jam kerja, tapi ya kita tidak tau kondisinya seperti apa, jadi terkadang kita juga harus maklum atas ketidakhadiran ini mas.

P : Selain itu, ada lagi tidak Pak hambatan yang memang pernah sangat mengganggu aktivitas wisata kawasan Kaliadem? Bagaimana komunitas mengatasi permasalahan itu?

N : Ini mas, dulu itu sempat terjadi kasus kecurangan tiket masuk kawasan wisata ini. Yang pasti ini awalnya kita terima aduan dari anggota yang kemudian diteruskan ke saya selaku ketua komunitas dan saya teruskan lagi ke kepala desa. Ya itu mas, kecurangannya ini dilakukan sama supir *jeep* sama petugas wisata di pos jaga itu mas. Kecurangan yang pernah terjadi antara supir *jeep* dan petugas wisata itu sudah pernah kita evaluasi bersama, mas. Ini terjadi atas permintaan oknum yang memang tidak sepakat atau ingin mencari untung dari retribusi tiket masuk. Sebenarnya komunitas gampang saja mengambil tindakan kalau semisal menemukan permasalahan ini mas. Kalau kami ya ada proses audit untuk mengatasi persoalan ini, artinya kami hitung ulang berapa tiket yang tercetak pada hari itu, berapa jumlah *jeep* yang masuk, berapa pendapatan yang diterima. Nah dari sini nanti ketahuan sudah berapa lama kegiatan ini berlangsung. Pada dasarnya, komunitas atau pihak eksternal harus selalu berpegang pada aturan yang berlaku mas, itu kuncinya agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik.

P : Oh begitu ya Pak. Terakhir yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana komunitas dapat menjamin kebersihan dan kondisi lingkungan hidup yang nyaman bagi wisatawan Pak?

N : Oke mas, baik. Komunitas selalu menerapkan bagaimana agar kondisi obyek wisata itu tertata dengan baik. Dari sini, komunitas akan sering melakukan pembersihan, penataan, dan itu berulang-ulang setiap harinya mas, dan harus dilaksanakan oleh anggota yang bertugas di obyek wisata. Saya rasa dengan banyaknya antusiasme wisatawan ke kawasan Kaliadem menjadikan anggota komunitas disiplin untuk melaksanakan pekerjaan yang memang sesuai dengan tanggung jawabnya karena dengan banyaknya wisatawan ini, komunitas harus menjaga kondisi kawasan wisata to mas, supaya wisatawan merasa nyaman.

P : Baik Pak Wiyana, saya rasa itu saja Pak beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait kebutuhan penelitian saya ini.

N : Ya mas, siap.

P : Terima kasih banyak Pak Wiyana atas waktu dan bantuannya selama saya melakukan penelitian ini. Sehat selalu ya Pak.

N : Sama-sama mas, amin, sehat untuk kita semua.

## **TRANSKRIP WAWANCARA**

**Nama** : Triyanto  
**Jabatan** : Anggota Pokdarwis  
**Tanggal** : 5 November 2021  
**Tempat** : The Lost World Park, Desa Kepuharjo

P : Selamat siang, Pak Triyanto. Saya mohon izin mengganggu waktunya Pak untuk saya melakukan wawancara bersama Bapak terkait pengembangan pariwisata kawasan Kaliadem, sesuai dengan pembicaraan saya dengan Bapak beberapa hari yang lalu.

N : Oh boleh mas, silakan saja.

P : Untuk sekarang, apakah benar Bapak masih aktif menjadi anggota pokdarwis Pak?

N : Betul mas, saya saat ini masih aktif kok sebagai anggota pokdarwis.

P : Bagaimana Pak kira-kira aktivitas di pokdarwis, apakah masih berjalan efektif?

N : Masih jalan kok mas, cuma ya karena masih pandemi covid to jadi aktivitas untuk ketemu itu ya belum ada mas.

P : Lalu bagaimana komunikasi antar anggota Pak?

N : Kita lewat grup whatsapp itu saja mas komunikasiannya.

P : Oh begitu ya Pak. Untuk saat ini apakah ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh pokdarwis sendiri Pak?

N : Untuk kegiatan sekarang ini kita masih menyesuaikan mas, terlebih sekarang kan masih situasi pandemi itu tadi ya. Untuk sekarang ini Pokdarwis itu sedang fokus ke obyek-obyek wisata yang ada di Kepuharjo. Kalau Pokdarwis itu selalu memantau aktivitas setiap obyek wisata, ya mungkin kalau sekarang itu masalah protokol kesehatan harus diketatin, terus kayak mitigasi bencana juga, kan di sini rawan bencana merapi juga, terus kita buat struktur mitigasi bencana gitu mas. Pokdarwis itu punya tanggung jawab untuk menegakkan poin-poin sapta pesona di obyek wisata. Di situasi pandemi sekarang ini, pokdarwis ikut memonitor pelaksanaan 3M di obyek wisata mas. Selain itu kita juga punya tanggung jawab untuk membuat struktur mitigasi bencana bagi wisatawan

karena wisatawan ini kan berada dekat dengan Gunung Merapi, jadi kita harus selalu waspada mas.

P : Berarti Wisata Kawasan Kaliadem juga jadi fokus pokdarwis ya Pak?

N : Ya betul mas, apalagi di sana itu kan yang paling dekat dengan merapi, sangat beresiko kalau tiba-tiba merapi itu erupsi. Protokol kesehatan juga kita ketatkan di sana karena Kaliadem itu obyek wisata yang sangat banyak didatangi sama wisatawan. Istilahnya, kalau wisatawan datang ke sini, mereka mayoritas menjadikan Kaliadem itu buat destinasi wisata mereka.

P : Memang apa yang membuat Kaliadem didatangi banyak wisatawan Pak?

N : Kalau yang saya lihat, Kaliadem itu kan tempat yang paling tinggi banget mas dan dekat sama merapi. Orang-orang datang ke sana itu kebanyakan buat melihat merapi dari dekat, kawasannya juga didukung sama pemandangan yang sangat bagus mas, kan kelihatan itu jogja dari Kaliadem ini.

P : Berarti di kawasan Kaliadem ini cuma ada bunker itu aja ya Pak?

N : Betul mas, tapi bunker itu didukung sama pemandangannya juga mas, itu yang bikin wisatawan berdatangan ke sini. Jadi, keinginan wisatawan datang ke sana itu bukan hanya buat ngeliat bunkernya itu aja.

P : Tadi saya rasa cukup menarik Pak ketika Bapak mengatakan ada struktur mitigasi yang disiapkan oleh pokdarwis dalam menjamin keselamatan wisatawan. Bagaimana maksud dari struktur mitigasi ini Pak?

N : Itu maksudnya kayak tim sapu bersih, terus tim yang evakuasi. Ya itu tujuannya melindungi wisatawan yang berkunjung itu mas, kalau semisal sewaktu-waktu merapi erupsi dan ini berlaku di setiap obyek wisata di Kepuharjo sebenarnya, terutama Bunker Kaliadem itu. Itu kan lokasinya dekat sekali mas, kalau ngga salah itu tiga kilometer-an jaraknya dari merapi. Posisi bunker itu ya beresiko sekali, tapi ya tetap ramai itu dan terlebih sekarang kan status merapi itu kan level siaga mas, jadi kami harus selalu siaga untuk menyiapkan mitigasi ini.

P : Siapa saja pihak yang terlibat untuk menyusun alur mitigasi itu Pak?

N : Yang pasti pokdarwis mas, tapi itu semua harus melalui proses sosialisasi juga dengan pemerintah desa dan komunitas pengelola kawasan Kaliadem.

P : Untuk sekarang, kira-kira ada berapa orang anggota pokdarwis Pak?

N : Kalau anggota itu ada sekitar 30 orang mas. Pokdarwis ini kan anggotanya diambil dari perwakilan pengelola obyek wisata di Desa Kepuharjo mas. Di Desa Kepuharjo itu sekarang ada delapan obyek wisata mas, jadi tiap-tiap obyek ini kan punya anggota pengelola, nah itu mereka beberapa orang ditarik jadi anggota pokdarwis juga.

P : Kalau Bapak sendiri bagaimana Pak?

N : Saya itu pengurus ini mas The Lost World Park.

P : Oh begitu ya Pak. Saya mencoba untuk menarik ke belakang dulu saja Pak. Melalui informan sebelumnya, saya dapat informasi bahwa waktu perencanaan kawasan Kaliadem ini dibuka itu atas dorongan masyarakat, apakah Bapak terlibat di dalamnya waktu itu?

N : Tentu mas, saya terlibat di dalamnya dulu. Jadi dulu itu memang ada dorongan dari masyarakat untuk membuka kembali kawasan Kaliadem ini dan memang didukung sama pemerintah desa juga. Sebelumnya, pemerintah desa itu udah pernah sampein juga ke masyarakat kalau ada rencana untuk itu mas dan memang masyarakat langsung semangat gitulah mas. Waktu itu kan kondisi ekonomi masyarakat belum stabil mas karena erupsi itu, mata pencaharian asli mati dan harapan kami itu ya cuma dari pariwisata ini.

P : Berarti pembentukan pokdarwis itu setelah kawasan Kaliadem ini dibuka jadi kawasan wisata ya Pak? Karena yang saya tahu, Wisata Kawasan ini yang jadi obyek wisata pertama di Desa Kepuharjo, begitu kan Pak?

N : Benar mas, setelah kawasan ini dibuka, barulah pokdarwis dibentuk.

P : Ada kriteria khusus tidak Pak untuk menjadi anggota pokdarwis?

N : Ngga ada mas. Karena anggota ini juga bagian dari pengelola-pengelola jadi ngga rumit untuk mencari anggota pokdarwisnya.

P : Oh begitu ya Pak. Lalu, dalam membuat peraturan atau keputusan, apakah pokdarwis hanya membuat peraturan tentang mitigasi bencana dan protokol kesehatan saja Pak? Bagaimana prosesnya Pak?

N : Betul mas, pokdarwis hanya membuat peraturan yang memang mendukung aktivitas sadar wisata, dimulai dari pembuatan alur struktur mitigasi bencana itu tadi dan protokol kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Keputusan yang dibuat oleh pokdarwis itu berasal dari temuan permasalahan di kawasan

wisata, mas. Misalnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, mitigasi bencana dan protokol kesehatan ini kan memang keputusan yang sudah wajib harus kita laksanakan di situasi sekarang ini. Bagaimana alur mitigasi bencana yang baik dan benar itu kan nanti kita lakukan koordinasi dengan pengelola karena kita juga harus tau bagaimana pendapat mereka mengenai alur yang kita tawarkan, karena yang tau kondisi wilayah kawasan wisata kan mereka mas.

P : Apakah ada proses sosialisasi dan diskusi dengan pihak di luar pokdarwis Pak?

N : Tentu ada mas. Peraturan yang dibuat sama pokdarwis itu kan berawal dari kekurangan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pariwisata di lapangan mas. Ya ini kami buat melalui jejak diskusi juga dengan komunitas dan pemerintah desa. Setelah peraturan ini kita buat, kita sosialisasikan kepada komunitas dan pemerintah desa itu mas dalam rapat, jadi mereka juga kasi pendapat dan solusi juga kalau memang dirasa peraturan yang kita buat tidak sesuai atau kurang sesuai gitulah.

P : Kalau semenjak covid ini, bagaimana aturan yang diberlakukan Pak?

N : Kalau sekarang itu paling pembatasan kapasitas di dalam obyek wisata mas. Ya kalau sekarang kan sudah mulai longgar lah ya karena sudah level dua juga, tapi kalau pas awal-awal pembukaan kemarin itu ya kita masih coba sekitar 50 persen mas. Tapi ya balik juga mas, kalau pas ramai kita juga ngga bisa koordinir kadang mas karena *jeep* wisatawan itu kan masuk terus, padahal *jeep* yang sebelumnya itu juga belum keluar, ya jadi numpuk jadinya. Ya contohnya itu waktu di bunker itu mas, *jeep* itu banyak banget, tapi ya karena bunker itu obyek wisata paling dicari sama wisatawan juga kan mas dan jadi obyek wisata yang ramai. Kalau ke daerah sini itu, bunker itu udah jadi semacam keharusan atau rute wajib lah buat wisatawan gitu mas.

P : Terakhir yang mau saya tanyakan Pak. Ada tidak Pak hambatan yang dirasakan pokdarwis dalam menjalankan fungsi atau tugasnya sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menerapkan sapta pesona di kawasan wisata?

N : Sejauh ini tidak ada ya mas, semua anggota cukup aktif dalam memberikan saran dan masukan, aktif juga untuk menerapkan peraturan yang dibuatnya di kawasan wisata.

P : Oh begitu ya Pak, berarti pokdarwis terbilang bagus ya Pak dalam menjalankan aktivitasnya.

N : Alhamdulillah mas, yang saya tahu memang seperti itu.

P : Baik Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Triyanto atas waktu dan bantuannya dalam menyelesaikan penelitian saya ini, sehat selalu buat Bapak.

N : Sama-sama mas Kevin, sehat selalu juga buat masnya.



## TRANSKRIP WAWANCARA

**Nama** : Febi Eiboy  
**Jabatan** : Sopir Merapi Jeep Land Cruiser (MJLC)  
**Tanggal** : 5 November 2021  
**Tempat** : Bunker Kaliadem

P : Selamat siang, Mas Febi. Sebelumnya saya mohon izin mas untuk melakukan wawancara bersama Mas Febi guna keperluan penelitian skripsi saya. Mohon kiranya saya dibantu ya mas hehehe.

N : Silakan aja mas, santai, mumpung lagi ngga sibuk ini, penumpang saya tadi lagi keliling bunker ini juga hehehe.

P : Gimana mas sekarang? Apa aktivitas rutin yang dikerjakan? Apakah hanya jadi sopir *jeep* saja atau ada yang lain mas?

N : Ini saja sih mas hehehe, di sini juga terbilang sibuk soalnya, tiap hari wisatawan ada terus.

P : Satu hari bisa sampai berapa trip mas?

N : Tergantung mas, kadang ya cuma empat, kadang ya kalau lagi ramai wah itu bisa sampai puluhan trip mas, ngga sempat istirahat.

P : Biasanya hari apa saja mas kalau ramai?

N : Yang pasti sih akhir minggu ya mas, kayak jumat, sabtu, dan minggu itu pasti ramai sekali mas, itu kendaraan kita juga bisa sampai habis di *basecamp* dan bisa sampai antri juga wisatawannya mas.

P : Oh gitu ya mas. Jadi Mas Febi sudah berapa lama gabung di kelompok *jeep* ini mas?

N : Belum lama sih mas, baru sekitar tiga tahun yang lalu mas.

P : Sebelumnya sudah pernah jadi sopir *jeep* atau belum mas?

N : Belum mas, ini yang pertama kali sih dan sampai sekarang masih di kelompok ini.

P : Saya langsung ke pertanyaan ini saja deh mas, sejauh apa sebenarnya peran kelompok *jeep* dalam mendukung aktivitas pengembangan pariwisata di kawasan Kaliadem ini?

N : Kelompok *jeep* ini kan sebenarnya bertugas untuk mengantarkan wisatawan dalam berwisata di sekitar Desa Kepuharjo, terutama di Kaliadem mas, di sana kan bunker Kaliadem dan itu jadi prioritas perjalanan wisatawan kalau yang saya lihat. Tapi di sisi lain, sebagai kelompok *jeep* wisata, kami menjalin mitra dengan komunitas pengelola dalam hal promosi kawasan Kaliadem ini. Untuk mendukung aktivitas kawasan ini, kami menawarkan perjalanan wisata dengan menggunakan *jeep* kepada wisatawan. Segala bentuk promosi kawasan dan perjalanan wisata ada kami posting di media sosial. Kami wajib untuk ikut mempromosikan kawasan ini karena kami kan kelompok *jeep* wisata yang basisnya di kawasan Kaliadem dan secara otomatis, kami juga harus menyampaikan informasi kepada wisatawan bagaimana kondisi kawasan ini yang sebenarnya mas.

P : Apakah sebelumnya ada instruksi agar kelompok *jeep* ini dijadikan sebagai pihak yang mempromosikan kawasan Kaliadem mas?

N : Dalam forum pertemuan dengan komunitas, ya kami diberi petunjuk untuk membantu mereka dalam memfasilitasi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Kaliadem melalui persewaan *jeep* yang kami miliki. Selain itu, kami juga diminta untuk memasarkan kawasan Kaliadem ini melalui media sosial kami mas. Itu memang keputusan dari komunitas yang sudah dikomunikasikan ke kami dan itu keputusan yang sangat mengikat bagi kami, setelah itu kami ya juga langsung laksanakan di lapangan mas.

P : Apakah ada masalah dalam menjalani aturan tersebut mas?

N : Ya karena saya masih tiga tahunan ya mas dan sepahaman saya sampai hari ini ngga ada sih mas. Di sisi lain saya juga sudah pernah ngobrol bareng teman-teman mengenai kondisi awal dulu ya memang tidak ada masalah mas. Kalau tugas untuk mempromosikan sih sebenarnya saya rasa ngga ada kesulitan itu mas, ya memang kami juga pasti secara tidak langsung harus mempromosikan kawasan wisata. Kalau kita ngga promosikan, siapa yang mau berkunjung ke sini dan siapa yang tau kalau ada moda transportasi *jeep* di sini ya kan mas hehehe.

P : Ya juga mas hehehe. Lalu, kira-kira kelompok *jeep* ini sering rapat ngga mas? Maksudnya itu rapat bareng komunitas pengelola kawasan Kaliadem atau sama pemerintah desa gitu mas?

N : Ada mas. Dalam sekali sebulan itu nanti kita pasti ada perwakilan untuk rapat bersama komunitas.

P : Apa saja yang dibahas biasanya mas?

N : Ya tentang evaluasi saja sih mas. Jadi kan komunitas juga pengen tahu sejauh apa peran kita, dan mereka juga pengen kita memberikan masukan kepada pengelola supaya obyek wisata itu makin bagus, saya rasa itu-itu saja kok mas pembahasan kami.

P : Berarti kehadiran kelompok *jeep* juga berdampak dong ya mas terhadap pengembangan kawasan wisata?

N : Ya kalau itu silakan saja dinilai masing-masing mas, tapi saya melihat kalau kami juga adalah mitra komunitas dalam menjalankan aktivitas wisata di sini.

P : Kalau dalam rapat gitu, apakah pendapat dari kelompok *jeep* selalu dipertimbangkan mas untuk dijadikan sebagai acuan terhadap aturan?

N : Itu sudah jelas mas. Di dalam rapat kan kami hadir dan dikasi waktu untuk berbicara juga mas, tapi ya balik lagi, masalah itu diterima atau tidak, dijadikan sebagai acuan atau tidak kan ada di tangan komunitas mas, ketuanya lah terutama.

P : Biasanya kalau wisatawan mau menyewa jasa transportasi *jeep* itu harus bayar berapa sih mas?

N : Tergantung mas, mulai dari Rp 350.000,- sampai Rp550.000,- mas. Itu semua sudah kita tentukan apa saja trip perjalanannya mas, tinggal menyesuaikan permintaan dari wisatawan saja.

P : Itu yang menentukan harganya siapa mas? Apakah melibatkan komunitas atau pemerintah desa?

N : Kalau itu memang dari kami kelompok komunitas mas dan dalam menentukan ini, kami juga harus menyesuaikan harga juga dengan lamanya perjalanan. Dulu itu setahu saya teman-teman *jeep* mensosialisasikan hal ini dengan komunitas dan pemerintah desa juga mas.

P : Sampai hari ini ada keluhan tidak mas mengenai harga tersebut?

N : Ngga ada sih mas, kalau ada keluhan mahal atau murah, ya kita kan bisa lihat dari antusiasme wisatawan juga. Kita menawarkan harga sekian, ya kalau tidak sesuai dengan *budget* ya sudah kami juga ngga mungkin bikin tarif di bawah harga yang sudah ditentukan.

P : Memangnya kenapa mas kalau semisal membuat harga di bawah aturan?

N : Ya ngga bisa to mas, kan harganya sudah sesuai dengan aturan, kalau kita bikin di bawah harga aturan, yang ada kita kena tegur mas.

P : Berarti kelompok *jeep* ini juga harus taat aturan juga ya mas dalam merespon aturan yang dibuat oleh komunitas atau pihak pemerintah desa gitu?

N : Pasti mas kalau itu, semua pihak yang terlibat harusnya memang seperti itu.

P : Tapi informasi yang saya dapat dari informan sebelumnya mengatakan bahwa dulu itu pernah ada kecurangan antara petugas wisata dengan sopir *jeep* ya mas?

N : Itu dulu mungkin ya mas, sebelum saya di sini, saya juga dapat informasi itu juga kok. Tapi menurut saya ya salah sih mas, artinya kita ini kan yang udah taat sama aturan merasa jengkel juga ngeliat teman-teman yang ngga taat aturan ini. Ya saya paham sih mas, demi untung yang lebih banyak mungkin, jangan keulang lagi sih mas harapannya hehehehe.

P : Saya rasa itu saja mas yang mau saya tanyakan ke Mas Febi, makasih banyak ya mas saya sudah dibantu dan memberikan waktunya ke saya. Sehat selalu untuk Mas Febi.

N : Makasih juga Mas Kevin, sehat selalu mas.